

**Kunjungan Wakil Bupati Serang Najib Hamas ke DLHK  
Provinsi Banten Bahas Pengembangan Perhutanan Sosial,  
Serang, 04 Mei 2026**



## ***Pendahuluan***

Pembangunan sektor kehutanan dan lingkungan hidup saat ini tidak lagi hanya berfokus pada aspek konservasi semata, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus mendorong berbagai program yang mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu program strategis yang dinilai mampu menjawab tantangan tersebut adalah program Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak oleh masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak fungsi ekologis hutan.

Di Provinsi Banten, pengembangan Perhutanan Sosial menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa hutan. Banyak masyarakat yang selama bertahun-tahun telah menggantungkan hidupnya dari aktivitas di sekitar kawasan hutan, baik melalui pertanian, perkebunan, maupun pemanfaatan hasil hutan lainnya. Oleh karena itu, keberadaan skema Perhutanan Sosial diharapkan mampu memberikan kepastian pengelolaan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Serang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten yang memiliki potensi pengembangan Perhutanan Sosial cukup besar. Beberapa kawasan hutan di wilayah tersebut telah lama dimanfaatkan masyarakat melalui skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten. Dalam praktiknya, masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) telah melakukan aktivitas pengelolaan lahan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun demikian, pengembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Serang masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait legalitas berupa Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, baru terdapat dua SK Perhutanan Sosial yang terbit di Kabupaten Serang, yaitu di Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Cinangka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan dan dukungan lintas sektor agar program Perhutanan Sosial dapat berkembang lebih luas.

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan mendorong percepatan pengembangan Perhutanan Sosial, *Wakil Bupati Serang*, **Najib Hamas**, melakukan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten pada tanggal 4 Mei 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas berbagai peluang kerja sama, fasilitasi kelompok tani hutan, hingga sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut juga menjadi wadah diskusi mengenai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pelatihan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan ekonomi berbasis kehutanan sosial. Selain itu, kunjungan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.

## ***Kunjungan Wakil Bupati Serang ke DLHK Provinsi Banten***

Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait peluang pengembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Serang. Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Bupati Serang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang beserta jajaran.

Kunjungan ini disambut langsung oleh jajaran DLHK Provinsi Banten. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik dalam pengembangan sektor kehutanan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Serang menyampaikan bahwa pengembangan Perhutanan Sosial menjadi salah satu prioritas yang perlu didorong secara bersama-sama. Program ini dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, khususnya para petani dan kelompok masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas di kawasan hutan.

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, skema Perhutanan Sosial juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah lebih besar. Dengan adanya legalitas pengelolaan kawasan hutan, masyarakat akan memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan ekonomi keluarga.

Wakil Bupati Serang juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan program Perhutanan Sosial. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk terkait aspek legalitas dan pendampingan masyarakat.

## ***Potensi Pengembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Serang***

Kabupaten Serang memiliki potensi kawasan hutan yang cukup luas dan dapat dikembangkan melalui skema Perhutanan Sosial. Selama ini, sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan telah melakukan aktivitas pengelolaan lahan melalui pola tanam pertanian maupun agroforestri.

Aktivitas penggarapan masyarakat tersebut telah berlangsung sejak kawasan hutan dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten melalui skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam pelaksanaannya, masyarakat tergabung dalam organisasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pengelolaan kegiatan masyarakat di kawasan hutan.

Keberadaan LMDH dinilai sangat penting karena menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pengelola kawasan hutan. Selain itu, LMDH juga memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Saat ini, skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Serang baru memiliki dua Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan, yaitu di Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Cinangka. Meskipun jumlahnya masih terbatas, keberadaan dua SK tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam pengembangan program Perhutanan Sosial di wilayah Kabupaten Serang.

Pemerintah Kabupaten Serang berharap agar cakupan Perhutanan Sosial dapat terus diperluas ke wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi serupa. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh manfaat dari program tersebut.

## ***Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan***

Salah satu fokus utama dalam pengembangan Perhutanan Sosial adalah pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemerintah tidak hanya memberikan akses pengelolaan lahan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana identifikasi kelompok tani LMDH yang berada di sekitar kawasan hutan untuk diberikan fasilitasi sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Fasilitasi tersebut meliputi pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha produktif, hingga pendampingan pemasaran hasil usaha masyarakat.

Pelatihan yang diberikan nantinya diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu, pertanian terpadu, hingga pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, masyarakat dapat memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari aktivitas pengelolaan kawasan hutan.

Selain pelatihan, pengembangan kelembagaan juga menjadi perhatian penting. Kelompok tani hutan yang memiliki kelembagaan kuat akan lebih mudah dalam mengakses bantuan pemerintah, program pemberdayaan, hingga peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

Pemerintah juga berupaya melakukan sinkronisasi program dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa hutan. Koperasi diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan usaha bersama sekaligus mendukung pemasaran hasil produksi masyarakat.

Melalui penguatan koperasi, masyarakat desa hutan dapat memiliki akses lebih luas terhadap permodalan, distribusi hasil usaha, dan pengembangan jaringan pasar. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari program Perhutanan Sosial dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat.

## **Pentingnya Pendekatan Kolaboratif**

Pengembangan Perhutanan Sosial membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga pendamping, hingga masyarakat harus berjalan bersama dalam satu tujuan yang sama.

Kepala DLHK Provinsi Banten **Dr. Wawan Gunawan, S.Sos., M.Si** dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat sebenarnya dapat terus berjalan tanpa harus menunggu terbitnya legalitas berupa SK Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan. Yang paling penting adalah tetap melibatkan masyarakat penggarap yang telah lama eksis dan menggantungkan hidup dari kawasan hutan.

Pendekatan ini dinilai sangat penting untuk mencegah munculnya konflik sosial di lapangan. Selama ini, masyarakat telah melakukan aktivitas pengelolaan lahan secara turun-temurun sehingga perlu diberikan ruang partisipasi dalam setiap kebijakan pengelolaan kawasan hutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan penerbitan SK Perhutanan Sosial melalui koordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial Bogor. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan.

Selain aspek legalitas, pendekatan kolaboratif juga penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan hutan yang baik harus mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan hutan.

## ***Perhutanan Sosial sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan***

Program Perhutanan Sosial tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, rasa memiliki terhadap kawasan hutan akan semakin meningkat.

Masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi dari hutan cenderung memiliki kepedulian lebih tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Mereka akan menjaga kawasan hutan dari aktivitas perusakan, pembalakan liar, maupun alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Selain itu, penerapan pola agroforestri dalam Perhutanan Sosial juga dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Kombinasi tanaman kehutanan dan tanaman pertanian mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga kualitas tanah dan sumber air.

Perhutanan Sosial juga berperan dalam mendukung mitigasi perubahan iklim melalui upaya pelestarian tutupan hutan dan peningkatan vegetasi. Oleh karena itu, pengembangan program ini menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan di daerah.

## **Harapan terhadap Masa Depan Perhutanan Sosial di Banten**

Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Banten diharapkan terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program tersebut.

Kabupaten Serang memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu daerah yang berhasil mengembangkan Perhutanan Sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, masyarakat desa hutan dapat didorong menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi berbasis kehutanan.

Ke depan, diharapkan semakin banyak kelompok tani hutan yang memperoleh pendampingan dan akses legalitas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Program-program pelatihan, penguatan koperasi, dan pengembangan usaha produktif perlu terus diperluas agar manfaat Perhutanan Sosial dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses penerbitan legalitas Perhutanan Sosial serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai program pemberdayaan.

Dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak, Perhutanan Sosial tidak hanya menjadi program kehutanan semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## Penutup

Kunjungan Wakil Bupati Serang, **Najib Hamas**, ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada 4 Mei 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi pengembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Serang. Pertemuan tersebut menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam mendorong program kehutanan yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Perhutanan Sosial memiliki potensi besar dalam menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui program ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa hutan.

Keberadaan kelompok masyarakat seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menjadi modal penting dalam pengembangan program ini. Selama bertahun-tahun, masyarakat telah menjadi bagian dari pengelolaan kawasan hutan melalui skema PHBM bersama Perum Perhutani KPH Banten. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat harus terus dijaga agar pengembangan Perhutanan Sosial berjalan secara inklusif dan tidak menimbulkan konflik sosial.

Rencana identifikasi dan fasilitasi kelompok tani hutan melalui pelatihan, penguatan kelembagaan, hingga sinkronisasi program dengan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah nyata dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam secara produktif dan berkelanjutan.

Komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten untuk terus mendorong percepatan penerbitan SK Perhutanan Sosial melalui koordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial Bogor juga menjadi angin segar bagi masyarakat. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan kepastian dan pendampingan bagi masyarakat desa hutan.

Pada akhirnya, keberhasilan Perhutanan Sosial tidak hanya diukur dari jumlah SK yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, Perhutanan Sosial di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten diharapkan dapat berkembang menjadi model pengelolaan hutan yang berkelanjutan, produktif, dan mensejahterakan masyarakat.

***Sumber***

***Samariah***